

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Lambang Antono (2022) dalam penelitian yang berjudul **“Implementasi Kebijakan ODOL Dalam Upaya Meningkatkan Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Muatan Angkutan Barang”**. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Mei sampai Juni 2022 di 6 UPPKB Jawa Tengah dengan melibatkan Informan dan petugas di lapangan dan OPD terkait dengan instrument wawancara dan observasi serta dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif ini digunakan untuk menilai dan menganalisis data yang telah difokuskan tentang peranan pemangku kebijakan dalam menanggulangi persoalan transportasi barang dan jasa. Analisis induktif ini peneliti digunakan dengan cara menganalisis hal-hal yang khusus untuk selanjutnya ditarik kesimpulan yang objektif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan moda angkutan jalan raya mencapai proporsi 92 persen dibanding moda transportasi lainnya seperti kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang. Penyebab terjadinya pelanggaran muatan adalah tarif angkut barang yang semakin rendah dan rendahnya pendapatan pengemudi truk menjadi akar masalah dari keberadaan truk berlebihan muatan atau over dimension-over load (ODOL). Kondisi menutupi biaya terduga yang

dibebani pada pengemudi menjadi pemicu pengemudi angkutan barang membawa kelebihan muatan (over load) dengan menggunakan kendaraan berdimensi lebih (over dimension) karena pengemudi berhadapan langsung dengan kondisi di lapangan seperti harus menanggung biaya , tarif tol, pungutan liar, yang dilakukan petugas berseragam dan tidak berseragam, perampasan muatan, parker, urusan ban pecah, dan masalah teknis kendaraan lainnya. Permasalahan ODOL atau pelanggaran muatan angkutan barang berlebih dan dimensi kendaraan selain memberi dampak buruk terhadap kerusakan infrastruktur jalan, keamanan dan keselamatan lalulintas juga berdampak pada ekonomi masyarakat khususnya terhadap harga barang kebutuhan pokok. Penanganan masalah ODOL dirasakan sangat penting karena akan berpengaruh positif terhadap pembiayaan infrastruktur jalan yang berkurang (umur jalan sesuai dengan yang direncanakan) dan meningkatkan kualitas pelayanan transportasi. Namun disisi lain ada tantangan terkait pengaruh peningkatan biaya transportasi terhadap kenaikan harga kebutuhan barang pokok dan barang penting yang berdampak inflasi. Adapun jumlah pelanggaran di 6 (enam) wilayah UUPPKAB Jawa Tengah selama Januari sampai Juni tahun 2022 tercatat 64.240 kendaraan masuk Jembatan Timbang dengan jumlah pelanggaran sebanyak 4.653 kendaraan terdiri dari pelanggaran daya angkut (overload) 2.506 kendaraan atau sebesar 53,85 persen, tata cara muat 96 kendaraan atau 2,06 persen, laik jalan 244 kendaraan atau

5,4 persen, pelanggaran dokumen 1.807 kendaraan atau sebesar 38,84 persen.

2. Muhammad Alwan Yassin, Dida Rahmadanik, dan M. Kendry Widiyanto (2023) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dalam penelitian yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Over Dimension And Over Loading (ODOL) Angkutan Barang Industri Di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo”**. Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya kendaraan membawa bahan industri yang melebihi dimensi dan muatan berlebih ini terjadi di jalan Lingkar Timur Kabupaten Sidoarjo dikarenakan memang banyak sekali area industri di sekitar wilayah tersebut dan juga sebagai jalur masuknya angkutan kendaraan besar untuk melewati jalur kota. Maka dengan hal ini, ketika kendaraan tidak sesuai dengan standard untuk layak jalan pada angkutan barang industri dapat menyebabkan permasalahan baik dalam hal keselamatan, infrastruktur jalan, kondisi lalu lintas, dan menyebabkan kondisi kendaraan akan berkurang umur standard operasional. Kondisi tersebut juga disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo terkait dengan adanya kendaraan Over Dimensi Over Loading ini mengakibatkan beberapa titik ruas jalan mengalami kerusakan sehingga anggaran yang digunakan sangat besar hal ini menjadi persoalan tersendiri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Fokus pada penelitian ini adalah Impelementasi kebijakan over dimension and over loading (odol) angkutan barang industri di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

yang ditinjau berdasarkan teori implementasi menurut George Edward III yang terdapat empat variabel yaitu, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian terkait implementasi mulai dari memberikan sosialisasi, terkait dengan sumber daya pelaksanaan, sikap yang harus dilakukan serta kerjasama antar instansi dalam melakukan pengawasan terhadap angkutan barang yang diindikasikan melanggar aturan. Diharapkan bahwa Dinas Perhubungan dapat terus konsisten untuk melakukan kebijakan tersebut hal ini agar tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik. Kemudian Dinas Perhubungan untuk meningkatkan dalam segi hal tersebut agar memperkuat kebijakan sehingga tidak ada lagi kendaraan yang melanggar di Kabupaten Sidarjo.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan dalam disiplin ilmu dalam ilmu sosial memiliki karakteristik yang berbeda dari disiplin ilmu lainnya, yaitu sifatnya yang lebih kepada pemecahan masalah dan interdisipliner. Kebijakan yang ada tidak hanya berfokus pada penjelasan deskriptif semata, tetapi dapat memberikan alternatif atau rekomendasi akan jawaban atas suatu masalah atau isu publik. Kebijakan Publik sendiri diartikan sebagai sebuah pilihan dari pemerintah mengambil tindakan atau tidak mengambil sebuah tindakan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan publik lahir dari adanya sebuah masalah, isu, dan topik tertentu. Sehingga

tujuan dari kebijakan publik adalah menangani dan menanggapi isu atau permasalahan yang ada.

Dalam menanggapi sebuah masalah tentunya pemerintah selaku pembuat kebijakan memiliki keterbatasan. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan cara pandang dan cara berpikir pemerintah untuk melihat suatu hal terbatas. Untuk itu, perlu dipahami bahwa pemerintah sebagai pembuat kebijakan belum tentu dapat menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi. Dengan demikian dalam pelaksanaannya partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan dalam menyelesaikan suatu kebijakan publik. Dalam hal ini, masyarakat dapat membantu sejak suatu kebijakan itu mulai dirumuskan.

Menurut Fredrich dalam Agustino, (2017:166) “kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Pengertian kebijakan publik yang diberikan oleh Thomas R.Dye dalam Ayuningtyas (2014:8) yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*)”. Sementara itu, Anderson dalam Agustino (2017:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau kelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Menurut Abdul Wahab (2005), kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan public adalah suatu rangkaian yang harus dilaksanakan atau tidak, itu sudah menjadi keputusan pemerintah yang diikuit oleh seseorang atau kelompok aktor. Berkaitan dengan sutu permasalahan yang diperhatikan oleh pemerintah, kebijakan publik memberikan suatu tindakan sanksi yang mengarah pada suatu permasalahan yang telah menjadi perhatian oleh pemerintah.

2. Pengertian Implementasi

Impelemtasi diartikan sebagai pelaksanaan atas apa yang telah diputuskan dan disepakati sebelumnya. Proses Implementasi memiliki posisi yang sangat penting dalam kebijakan publik. Proses Implementasi memiliki posisi yang sangat penting dalam kebijakan publik. Hal ini dikarenakan tanpa adanya implementasi yang baik maka kebijakan yang telah ditetapkannya akan sia-sia dan tidak berjalan secara baaik dan benar. Untuk itu dalam kebijakan Publik pengimplementasian kebijakan sangatlah penting untuk dapat mencapai tujuan ditetapkannya suatu kebijakan publik.

Implementasi atau penerapan kebijakan publik merupakan tahapan penting dalam proses pembentukan kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan bersentuhan dengan kepentingan publik serta

dapat diterima oleh masyarakat. Implementasi kebijakan memiliki beberapa jenis model seperti model implementasi dari Grindle, model Implementasi Edward III, dan model Implementasi oleh Meter dan Horn.

Menurut Grindle suatu implementasi kebijakan publik dapat dikatakan berhasil apabila tercapainya tujuan yang diraih. Model implementasi kebijakan yang dikemukakan Grindle dalam Fajarwati dan Rahmadila (2022) dikenal dengan “*implementation as a political and administrative process*”. Grindle mengemukakan keberhasilan dari implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari dua hal yaitu: 1) dilihat dari prosesnya, sudah atau belum sesuai dengan design (ketentuan) yang merujuk pada aksi kebijakannya, dan 2) tercapainya suatu kebijakan. Dimensi ini dapat diukur dari dua faktor yaitu dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu atau kelompok dan tingkat perubahan yang terjadi. Menurut Grindle keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat ditentukan oleh variabel-variabel implementasi yang terdiri atas:

- 1) Isi kebijakan (*Content Of Policy*) antara lain:
 - a. Kepentingan yang mempengaruhi (*interest effected*). Berbagai kepentingan dapat mempengaruhi implementasi kebijakan.
 - b. Tipe manfaat (*Type of benefits*). Suatu kebijakan harus menghasilkan beberapa jenis manfaat yang positif.
 - c. Derajat perubahan yang ingin dicapai (*Extent of change envision*). Setiap kebijakan publik harus memiliki target capaian dengan skala yang jelas.
 - d. Letak pengambilan keputusan (*Site of decision making*). Salah satu proses penting dalam implementasi kebijakan publik ialah pengambilan keputusan yang bermanfaat untuk memastikan sebuah program yang telah dibuat tersebut sudah tepat.

- e. Pelaksanaan program (Program implementer). Program yang dijalankan berdasarkan suatu kebijakan yang kompeten dan memiliki kapabilitas.
 - f. Sumber daya yang digunakan (*Resources committed*). Sumber daya dalam implementasi kebijakan dapat menjadi faktor penentu keberhasilan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- 2) Lingkungan Implementasi (*Content Of Implementation*) yaitu terdiri dari:
- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat (*power, interest, and strategy of actor involved*).
 - b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa (institution and regime characteristic).
 - c. Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana (*compliance and responsiveness*).

Menurut teori Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Ravyansah *et al* (2022) disebutkan bahwa diperlukan identifikasi variabel dalam menganalisis pengimplementasian suatu kebijakan. Adapun variabel tersebut terdiri dari:

- a. Mudah tidaknya masalah tersebut untuk dikontrol.
 - 1) Kesulitan-kesulitan teknis
 - 2) Keragaman perilaku kelompok sasaran
 - 3) Persentase pelaksana sasaran kebijakan dibandingkan dengan jumlah penduduk
 - 4) Ruang lingkup perubahan yang ingin dicapai
- b. Kemampuan kebijakan dalam menstruktur proses implementasi.
 - 1) Kelugasan dan konsistensi terhadap tujuan
 - 2) Dipergunakannya teori kausalitas
 - 3) Rekrutmen pejabat pelaksana
- c. Pengaruh yang ditimbulkan dari berbagai variabel terhadap keseimbangan dalam mendukung kebijakan.
 - 1) Situasi sosial, ekonomi, dan teknologi
 - 2) Adanya support politik serta dukungan dari pejabat atasan
 - 3) Komitmen dalam melaksanakan kebijakan
 - 4) Gaya kepemimpinan pejabat pemerintah pelaksana

Dalam pernyataan yang lain, menurut Edward III dijelaskan dalam dua model, yaitu dampak langsung dan tidak langsung terhadap Implementasi. Menurut Edward III (2022) dalam Ravyansah *et al* untuk mengukur keberhasilan atas

pengimplementasian kebijakan setidaknya ada empat faktor yang menentukannya, yakni:

1. Komunikasi

Komunikasi berperan penting dalam tercapainya kesuksesan atas pengimplementasian kebijakan publik. Implementasi kebijakan akan berjalan baik apabila pejabat pembuat kebijakan telah memahami betul apa yang sedang dikerjakannya setidaknya terdapat tiga faktor untuk mengukur kesuksesan dari variabel komunikasi, yaitu:

- a. Transmisi, terjalin komunikasi yang lancar diantara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan, yang nantinya akan menghasilkan wujud implementasi kebijakan yang baik. Namun dalam praktiknya seringkali terjadi ketidaksesuaian dalam penyaluran komunikasi, sehingga menimbulkan missskomunikasi. Hal ini dapat terjadi ketika komunikasi yang dilakukan telah melalui perjalanan panjang akibat birokrasi yang ada.
- b. Kejelasan, setiap informasi yang diterima atas komunikasi yang terjalin antara pembuat dan pelaksana kebijakan di berbagai lini harus dijelaskan secara jelas dan lugas serta tidak langsung mengandung makna ganda yang menimbulkan kebingungan.
- c. Konsistensi, kebijakan yang telah disalurkan dalam komunikasi senaiknya todak berubah-ubah (konsisten) dan jelas, sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi mereka pelaksana kebijakan.

2. Sumber Daya

Faktor ini berkaitan dengan asset yang dimiliki oleh sesuatu organisasi dalam mendukung pengimplementasian kebijakan publik agar agar dapat terdapat terlaksana secara maksimal. Terdapat beberapa elemen dalam indikator sumberdaya ini, antara lain:

- a. Pegawai/staf. Sumber daya manusia memiliki posisi sebagai aset terpenting dalam suatu organisasi baik sektor publik maupun privat. Sering kali implementasi kebijakan menghadapi kegagalan dikarenakan SDM atau staf pelaksana implementasi kebijakan tidak mempunyai dan berkompeten dalam menjalankan kebijakan yang telah diputuskan tersebut.
- b. Informasi, ada dua macam informasi dalam pengimplementasian kebijakan, yaitu informasi terkait tata cara pelaksana kebijakan terhadap peraturan yang berlaku. Seorang implementor haruslah dibekali dengan pengetahuan yang cukup terkait apa yang sedang atau akan mereka jalankan. Mereka pula harus mengetahui

betul siapa-siapa yang terlibat dan harus patuh pada kebijakan yang dikeluarkan tersebut.

- c. Wewenang, dalam hal diartikan sebagai otoritas yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan publik. Biasanya sesuatu kewenangan itu bersifat formal, sehingga apabila tidak adanya legitimasi yang diberikan kepada pelaksana kebijakan akan menyebabkan tidak dianggapnya para implementor di mata masyarakat.
- d. Fasilitas, adanya sarana dan prasarana yang baik menjadi faktor penting dalam proses implementasi kebijakan. Dengan adanya prasarana yang memadai akan menunjang kinerja pegawai dalam pengimplementasian kebijakan yang ada.

3. Disposisi

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan disposisi (sikap pelaksana kebijakan) menjadi faktor penting lainnya yang perlu diperhatikan. Suatu implementasi kebijakan akan berjalan dengan efektif, apabila pelaksana dari kebijakan tersebut mengetahui apa yang ia lakukan dan bagaimana cara mengerjakannya. Dengan demikian pelaksana tugas dalam praktiknya tidak akan terhambat. Dalam disposisi terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti efek disposisi, pengaturan birokrasi, dan insentif

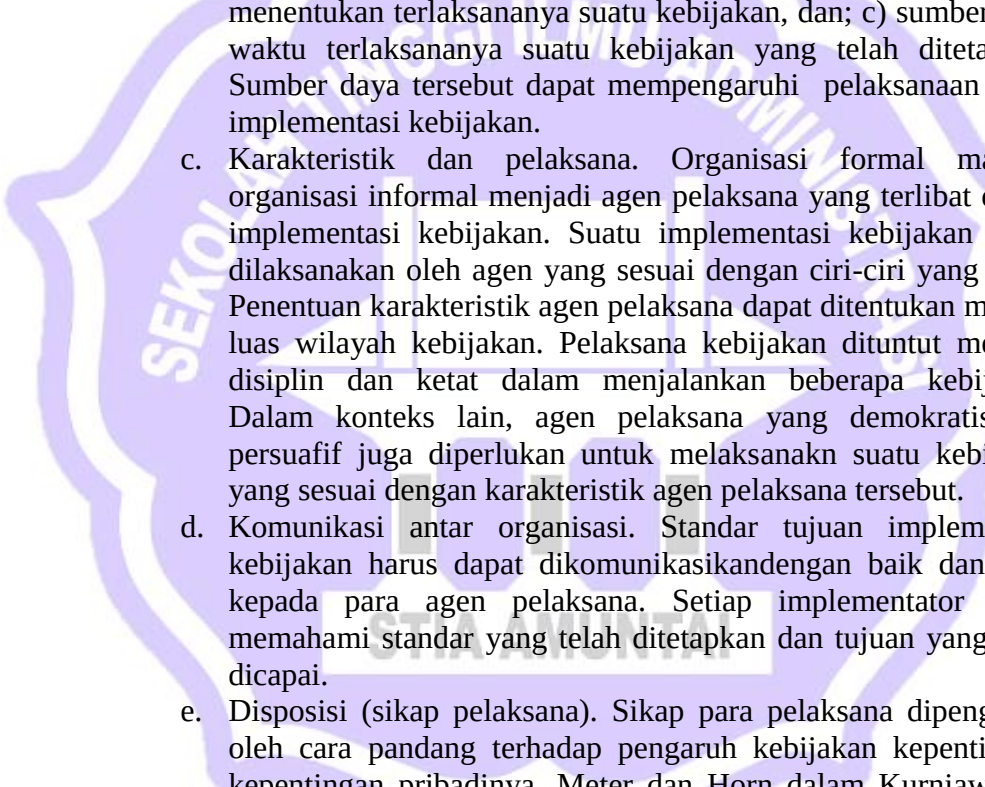
4. Struktural Birokrasi

Untuk mendorong kinerja struktur birokrasi terdapat dua karakteristik yang dapat digunakan, yaitu:

- a. Adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) yang fleksibel yang dijadikan pedoman sebagai pedoman bagi para pegawai dalam melaksanakan kegiatannya.
- b. Adanya pembagian kerja melalui pembagian tanggung jawab atas aktivitas dan program-program yang dijalankan beberapa unit kerja yang kompeten di bidang tersebut.

Menurut Meter dan Horn (1975) dalam Kurniawan dan

Maani (2020) menjelaskan bahwa keberhasilan sebuah implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel-variabel pendukung. Model implementasi kebijakan oleh Meter dan Horn dikenal dengan "*A model of Policy Impelemntation*" Dalam model ini Meter dan Horn menjelaskan bahwa kinerja publik dipengaruhi oleh beberapa variabel. Variabel yang dimaksud antara lain:

- 
- a. Standar dan sasaran kebijakan. Tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur melalui tujuan kebijakan yang bersifat realistis dan sosio-kultur. Dalam Kurniawan dan Maani (2020) Meter dan Horn mengatakan bahwa: “untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan harus menegaskan [ada standard dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan harus menegaskan pada standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penelitian atas tingkat ketercapain standard dan sasaran tersebut”.
 - b. Sumber daya. Keberhasilan suatu Implementasi kebijakan bergantung pada kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dalam melaksanakan implementasi kebijakan ada tiga sumber daya yang harus diperhatikan yaitu: a) manusia yang berkualitas (tenaga kerja); b) sumber daya finansial menentukan terlaksananya suatu kebijakan, dan; c) sumber daya waktu terlaksananya suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Sumber daya tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.
 - c. Karakteristik dan pelaksana. Organisasi formal maupun organisasi informal menjadi agen pelaksana yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Suatu implementasi kebijakan harus dilaksanakan oleh agen yang sesuai dengan ciri-ciri yang tepat. Penentuan karakteristik agen pelaksana dapat ditentukan melalui luas wilayah kebijakan. Pelaksana kebijakan dituntut menjadi disiplin dan ketat dalam menjalankan beberapa kebijakan. Dalam konteks lain, agen pelaksana yang demokratis dan persuasif juga diperlukan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang sesuai dengan karakteristik agen pelaksana tersebut.
 - d. Komunikasi antar organisasi. Standar tujuan implementasi kebijakan harus dapat dikomunikasikan dengan baik dan jelas kepada para agen pelaksana. Setiap implementator harus memahami standar yang telah ditetapkan dan tujuan yang akan dicapai.
 - e. Disposisi (sikap pelaksana). Sikap para pelaksana dipengaruhi oleh cara pandang terhadap pengaruh kebijakan kepentingan-kepentingan pribadinya. Meter dan Horn dalam Kurniawan & Maani, (2020) menyebutkan ada tiga jenis elemen respon yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan dari para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan, yaitu: a) pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan; b) arah respon para pelaksana kebijakan seperti penerimaan, penolakan, atau netral, dan; 3) intensitas terhadap kebijakan.
 - f. Kondisi lingkungan sosial politik dan ekonomi. Lingkungan eksternal dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Lingkungan eksternal yang dimaksud mencakup lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Kondisi lingkungan eksternal yang sangat kondusif dapat menjadi penyebab

kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan cara yang diperlukan lingkungan eksternal yang kondusif.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan model implementasi kebijakan Meter dan Horn (1975) sebagai rujukan karena variabel dalam model implementasi tersebut lebih cocok untuk menggambarkan penelitian secara relevan.

3. Konsep Over Dimension and Over Loading (ODOL)

Istilah Over Dimension and Over Loading (ODOL) merujuk pada kondisi kendaraan angkutan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis baik dari sisi dimensi maupun muatan.

- a. *Over Dimension* adalah kondisi ketika kendaraan mengalami perubahan ukuran (panjang, lebar, atau tinggi) melebihi standard teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perubahan tersebut biasanya dilakukan dengan cara memodifikasi bak kendaraan agar dapat menampung muatan lebih banyak.
- b. *Over Loading* adalah kondisi dimana kendaraan mengangkut beban melebihi kapasitas muatan yang telah ditentukan dalam izin spesifikasi teknis kendaraan.

Menurut Kementrian Perhubungan (2019) dalam peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, kendaraan yang melebihi dimensi dan daya angkut tidak diperbolehkan beroperasi karena berpotensi menimbulkan kerusakan infrastruktur jalan serta membahayakan keselamatan lalu lintas. Hal ini sejalan dengan

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan, khususnya pasal 19 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap kendaraan bermotor wajib memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Dengan demikian, ODOL adalah bentuk pelanggaran lalu lintas yang tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek sosial, ekonomi, dan keselamatan publik.

4. Dampak Over Dimension and Over Loading (ODOL)

Kendaraan ODOL menimbulkan berbagai dampak negative, baik dari sisi infrastruktur, ekonomi, maupun keselamatan lalu lintas.

a. Kerusakan Infrastruktur Jalan

- 1) Kendaraan dengan muatan berlebih memberikan beban berlipat pada jalan dan jembatan.
- 2) Menurut Kementrian PUPR (2020), sekitar 70% kerusakan jalan nasional di Indonesia disebabkan oleh kendaraan ODOL.
- 3) Kerusakan ini mengakibatkan tingginya biaya pemeliharaan dan pembangunan jalan yang harus ditanggung negara.

b. Ancaman Keselamatan

- 1) Kendaraan ODOL cenderung sulit dikendalikan, terutama saat pengereman
- 2) Data dari Korlantas Polri (2021) menunjukkan bahwa kendaraan ODOL terlibat dalam sekitar 21% kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa.

c. Kerugian Ekonomi

- 1) Kerusakan jalan memperlambat arus distribusi barang
- 2) Menurut kajian Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT, 2020), kerugian ekonomi akibat kendaraan ODOL mencapai Rp43 Triliun per tahun.

d. Dampak Sosial

- 1) Menurunnya kenyamanan pengguna jalan lain.
- 2) Meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda.

C. Kerangka Pemikiran

Dalam buku Metodologi Penelitian (DR. Agung Edy Wibowo : 2020) Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan. Kerangka pemikiran menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan kepada pembaca mengapa mempunyai angapan seperti hipotesis. Kerangka berpikir disajikan dengan bagan yang menunjukkan alur pikir peneliti dan serta berkaitan antar variabel yang direliti.

Uma Sekaran dalam bukunya Business Research, 1992 dalam (Sugiyono, 2010) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan, mengapa variabel

itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradig penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir (Sugiyono, 2010:60).

Kebijakan Over Dimension Over Loading (ODOL) merupakan kebijakan pemerintah untuk membatasi kendaraan angkutan barang agar sesuai dengan ketentuan dimensi atau muatan. Tujuannya adalah menjaga keselamatan lalu lintas, mengurangi kerusakan jalan, serta meningkatkan efektivitas transportasi darat. Secara hukum, ketentuan mengenai batas dimensi dan muatan kendaraan telah diatur dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas menegaskan bahwa “setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan, termasuk ukuran dan muatan”. Namun, Implementasi kebijakan ini sering menghadapi tantangan di lapangan, termasuk di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Menurut Meter dan Horn (1975) dalam Kurniawan dan Maani (2020), faktor-faktor penentu implementasi sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik dan pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi
5. Disposisi
6. Kondisi sosial politik dan ekonomi

Hal ini dapat dilihat pada kerangka pemikiran pada gambar 2.1 dibawah ini:

Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran

